



BADAN PENGHUBUNG
Provinsi Bali

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029



**ZONA
INTEGRITAS**



INDONESIA MAJU

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat disusun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

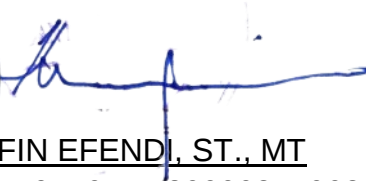
Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan Pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam Menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2025-2029 kedepan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran-saran dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Jakarta, 22 September 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI




ARIFIN EFENDI, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	14
2.5 Permasalahan Pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	15
2.6 Isu Strategis.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	20
3.1 Tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	20

3.2	Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	20
3.3	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029	22
3.4	Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029	22
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	24
4.1	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	24
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	34
BAB V	PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah dilantik dan ditetapkannya Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 20 Pebruari 2025, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan digunakan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah sebagai penjabaran teknis RPJMD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Tujuannya adalah memberikan arahan dalam perencanaan Badan Penghubung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan menyesuaikan dokumen-dokumen diatasnya seperti RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2025-2029 :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan :

a. latar belakang;

- b. dasar hukum penyusunan;
- c. maksud dan tujuan; dan
- d. sistematis penulisan.

Bab II :`Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, menguraikan tentang :

- a. tugas pokok dan fungsi dan Struktur PD;
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Kelompok sasaran layanan;
- e. Permasalahan pelayanan PD; dan
- f. Isu Strategis.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, menjelaskan tentang :

- a. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- b. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- c. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029; dan
- d. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menguraikan tentang :

- a. Uraian Program;
- b. Uraian Kegiatan;
- c. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- d. Uraian sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan

Bab V : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Fungsi dari Badan Penghubung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Menyenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait daerah serta pelayanan koordinasi pimpinan dengan pemerintah pusat;
- f. Menyenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- g. Menyenggarakan monitoring terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- h. Menyenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;

- i. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- k. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sub Bagian dan Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang – Sub Bidang;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- h. Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - j. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan lingkup Badan;
 - l. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan serta menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian dan Badan;
 - p. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - f. Membantu para pejabat Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;

- g. Melaksanakan kerjasama dan pembinaan dengan kelompok masyarakat asal daerah Bali yang berada di wilayah Jabotabek dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pergelaran seni budaya daerah dan pameran potensi daerah Bali di Anjungan Daerah Bali TMII;
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya dan pariwisata daerah;
- h. Mengelola Anjungan Daerah Bali sebagai show window Bali di TMII berbasis seni budaya dan pariwisata;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas:

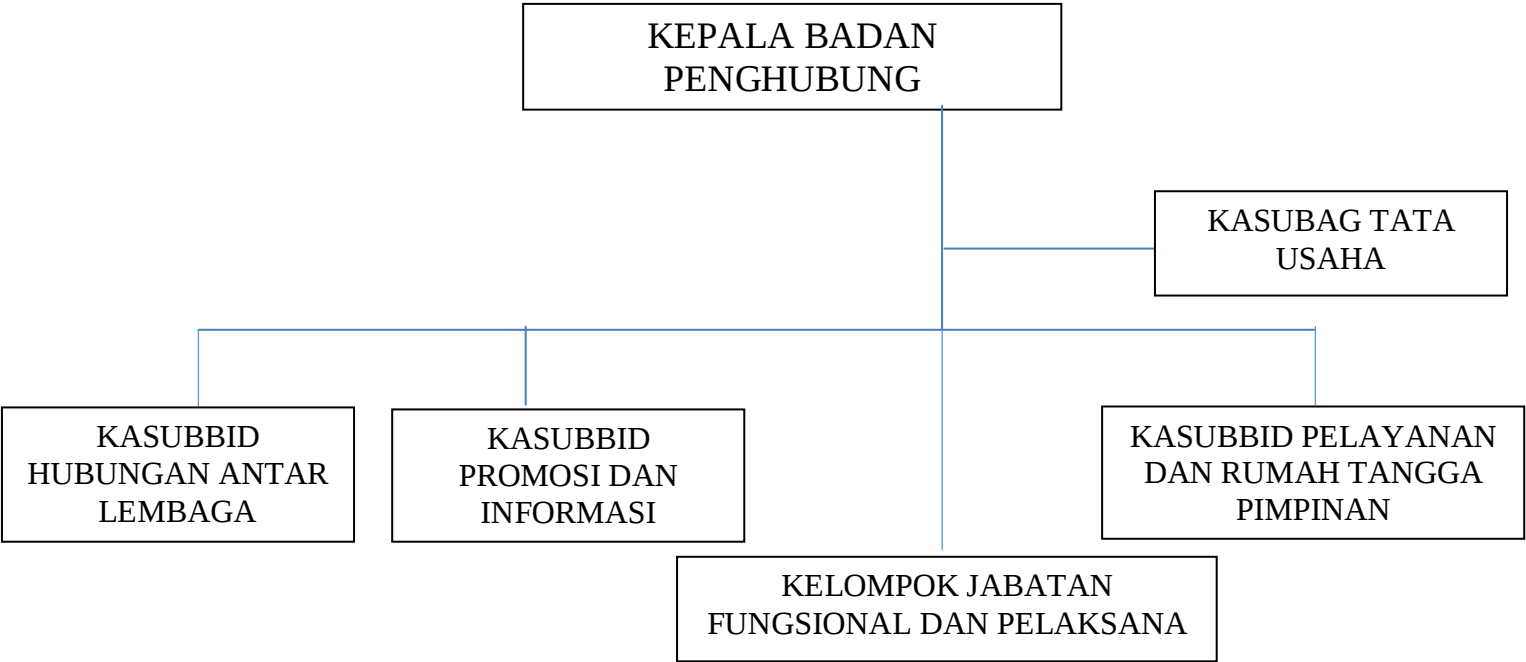
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;

- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Memberikan pelayanan kepada pimpinan Daerah yang melaksanakan tugas di Jabodetabek;
- g. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi dan konsumsi para tamu yang menginap;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Badan Penghubung Provinsi Bali;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali di Jabodetabek;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Gubernur Bali
 Nomor 25 Tahun 2023
 Tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelayanan tamu yang menginap di wisma, pelayanan informasi di Anjungan Daerah Bali, dan Hubungan Antar Lembaga. Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi dengan jumlah pegawai di Tahun 2025 seluruhnya 48 orang (terdiri dari 15 orang PNS, 3 orang PPPK, 23 orang tenaga kontrak dan 7 orang tenaga alih daya).

Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta tergantung kualitas dan kuantitas faktor sumber daya manusia yang ada. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali per 1 Agustus 2025 sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 4 orang
Golongan III	: 7 orang
Golongan II	: 4 orang
PPPK kelas X	: 3 orang
Kontrak	: 23 orang
Tenaga Alih Daya	: 7 orang
JUMLAH	: 48 orang
Berdasarkan Pendidikan	: (ASN)
Pasca Sarjana (S2)	: 7 orang
Sarjana (S1)	: 6 orang
Diploma/Sarjana Muda	: - orang
S.M.A	: 5 orang
JUMLAH	: 18 orang

Sarana dan prasarana yang sudah ada untuk mendukung pemberian pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Bangunan gedung wisma dengan 14 kamar (3 kamar VIP) di Cikini
- 2 Bangunan gedung kantor di Cikini
- 3 Ruang Rapat di lantai 3 gedung wisma Cikini
- 4 Bangunan-bangunan dengan arsitektur seni budaya Bali di Anjungan Daerah Bali TMII
- 5 Kendaraan roda 4 untuk operasional pimpinan sejumlah 11 unit

- 6 Kendaraan roda 4 untuk menunjang kegiatan di Anjungan Bali sejumlah 1 unit
- 7 Kendaraan roda 2 untuk operasional kegiatan rutin sejumlah 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
- 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
- 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, yang mendukung dalam Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2025-2029 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2024 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	pelayanan yang dimaksud meliputi : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta

		3. Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta 4. Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
--	--	--

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Tahun 2024 sudah baik dan melebihi target. Namun meskipun sudah memenuhi target, permasalahan-permasalahan yang muncul di Tahun 2024 dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pelayanan di tahun berikutnya.

CAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2024-2026	Realisasi s.d Tahun 2024	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	89,83	90	89,83	99,81%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		90,59			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		88,80			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		89,25			

4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		92,17			
---	--	-------	--	--	--

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali dari Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	75	80	80	90	90	85,96	84,91	89,27	88,32	89,83	114 %	106 %	98,73 %	98,13 %	99,81 %

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Prioritas : Program Pelayanan Penghubung	1.007.588.208	945.273.840	1.304.604.860	3.326.865.180	3.118.009.769	961.752.980	940.035.698	1.273.165.993	2.870.930.378	2.735.952.854	95,45	91,00	97,59	86,30	87,75	Pada Tahun 2023 ada kenaikan signifikan karena adanya tambahan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Pelayanan Umum untuk ASN di Badan Penghubung Provinsi Bali	serapan realisasi anggaran sudah maksimal

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penghubung Provinsi Bali merujuk pada pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari layanan yang disediakan oleh Badan Penghubung tersebut. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki tugas untuk menjembatani komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat, instansi lain, serta masyarakat Bali di luar daerah, terutama di Ibu Kota Negara.

Kelompok sasaran layanan Badan Penghubung Provinsi Bali dapat mencakup:

1. Pemerintah Pusat dan Lembaga Negara

Untuk menyampaikan kebijakan, aspirasi, atau informasi dari Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat, serta sebaliknya.

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali/Kabupaten/Kota se-Bali

Dalam hal koordinasi dan fasilitasi urusan administrasi, rapat, dan kegiatan dinas di luar daerah (terutama di Jakarta). Serta membantu Kabupaten/Kota se-Bali untuk memfasilitasi pengambilan surat-surat dinas yang mengharuskan diambil oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.

3. Masyarakat Bali di Perantauan

terutama yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Misalnya, dalam bentuk pelayanan informasi, fasilitasi kegiatan budaya, dan dukungan administratif.

4. Lembaga Swasta dan Mitra Kerja

Dalam rangka kerja sama dan promosi potensi daerah Bali (pariwisata, budaya, investasi, dll).

5. Mahasiswa dan Pelajar Bali di Jakarta

Membantu mahasiswa Bali yang memerlukan tempat tinggal selama melaksanakan studi di Jakarta dengan menempatkan di Asrama Mahasiswa Rawamangun.

2.5. Permasalahan Pelayanan Pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali di tingkat nasional, Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai perwakilan daerah yang menjembatani koordinasi kelembagaan, pelayanan pejabat dan tamu daerah, pembinaan masyarakat perantauan, serta promosi budaya dan pariwisata Bali. Namun, dalam pelaksanaan fungsi tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan strategis, sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal

Meskipun layanan yang diberikan telah mencakup berbagai fungsi keprotokolan dan fasilitasi pejabat/tamu daerah, namun masih dijumpai ketidakterpaduan dalam pelaksanaan pelayanan, baik dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem informasi pelayanan, hingga kualitas sumber daya pelaksana. Selain itu, sebagian proses layanan masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi secara menyeluruh, yang berdampak pada efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

2. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Kondisi gedung kantor dan fasilitas pendukung lainnya seperti Wisma Bali dan Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memerlukan pemeliharaan dan revitalisasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, perangkat teknologi informasi yang dimiliki belum cukup mendukung kebutuhan pelayanan berbasis digital, komunikasi kelembagaan, maupun dokumentasi kegiatan.

3. Promosi Budaya yang Belum Terstruktur

Kegiatan promosi seni dan budaya Bali yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung masih bersifat *event-based* dan belum terintegrasi dalam satu strategi promosi jangka menengah-panjang. Belum optimalnya kolaborasi dengan pelaku kreatif dan komunitas diaspora Bali di perantauan juga membatasi dampak promosi budaya secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di tingkat pusat, Badan Penghubung memiliki fungsi strategis dalam menjalin hubungan dengan kementerian/lembaga serta instansi pemerintah lainnya. Namun demikian, koordinasi kelembagaan tersebut masih bersifat administratif dan belum ditunjang oleh sistem informasi atau mekanisme pelaporan hasil koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

5. Minimnya Pendataan dan Pembinaan Diaspora Bali

Belum tersedianya data dan informasi yang memadai mengenai masyarakat Bali di perantauan menjadi kendala dalam merancang program pembinaan yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan yang dilakukan selama ini masih terbatas pada kegiatan sosial dan budaya yang bersifat simbolik, dan belum menyentuh aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Bali di luar daerah.

6. Keterbatasan Kapasitas SDM

Sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Badan Penghubung relatif terbatas jumlahnya dibandingkan dengan cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Selain itu, belum seluruh personel memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam bidang pelayanan publik, diplomasi budaya, pengelolaan kegiatan protokoler, maupun komunikasi kelembagaan.

2.6 Isu Strategis

Dari permasalahan yang ada, identifikasi isu-isu strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung.

Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai representasi Pemerintah Provinsi Bali di tingkat pusat, khususnya dalam membangun relasi kelembagaan, mendukung pelayanan pejabat daerah, promosi budaya, serta pembinaan masyarakat Bali di perantauan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat sejumlah potensi daerah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber daya kelembagaan. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Penghubung Provinsi Bali umumnya tidak bersifat pengelolaan sumber daya secara langsung seperti dinas teknis, tapi lebih pada fungsi representasi, fasilitasi, dan promosi potensi daerah di tingkat nasional. Dengan posisi strategis di luar daerah (di Jakarta), Badan Penghubung berperan sebagai “wajah daerah” di pusat.

Berikut adalah potensi daerah Bali yang menjadi ruang lingkup kewenangan dan kerja strategis Badan Penghubung:

1. Kekayaan Budaya dan Pariwisata Bali

Bali dikenal secara nasional dan internasional sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata Indonesia. Keberadaan Anjungan Daerah Bali di TMII merupakan media strategis untuk menampilkan potensi seni, budaya, adat istiadat, dan produk kreatif Bali. Hal ini menjadi peluang besar untuk mendukung branding daerah dan memperkuat diplomasi budaya.

2. Komunitas Diaspora Bali di Jakarta dan Sekitarnya

Terdapat jaringan masyarakat Bali yang cukup luas di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, baik dalam bentuk paguyuban, organisasi sosial budaya, maupun profesional Bali perantauan. Potensi ini menjadi kekuatan sosial yang dapat dioptimalkan dalam pembinaan, promosi budaya, penguatan ekonomi komunitas, serta peran advokasi Bali di tingkat nasional.

3. Aset Fisik Pemprov Bali di Luar Daerah

Sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dan kementerian/lembaga, serta antar-pemerintah daerah lainnya, Badan

Penghubung memiliki posisi yang unik dalam menjembatani kolaborasi lintas daerah maupun lintas sektor. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kerja sama strategis, baik dalam bentuk promosi investasi, pertukaran budaya, hingga sinergi kebijakan publik.

4. Jejaring Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Daerah

Sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dan kementerian/lembaga, serta antar-pemerintah daerah lainnya, Badan Penghubung memiliki posisi yang unik dalam menjembatani kolaborasi lintas daerah maupun lintas sektor. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kerja sama strategis, baik dalam bentuk promosi investasi, pertukaran budaya, hingga sinergi kebijakan publik.

5. Kesiapan Masyarakat dalam Era Digital dan Media Sosial

Tingginya penetrasi media sosial dan platform digital di kalangan masyarakat Bali di perantauan membuka peluang besar bagi Badan Penghubung untuk mengembangkan layanan digital, promosi online, dan komunikasi publik berbasis komunitas. Potensi ini mendukung efisiensi layanan, keterjangkauan informasi, serta partisipasi publik yang lebih luas.

6. Ketersediaan SDM Lokal dengan Kompetensi Budaya dan Layanan

Masyarakat Bali dikenal memiliki SDM unggul di bidang seni budaya, layanan publik, keprotokolan, dan hospitality, yang dapat direkrut atau dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Penghubung. Ini merupakan kekuatan internal yang sangat menunjang kualitas pelayanan dan promosi daerah.

Optimalisasi potensi-potensi di atas membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, serta pendekatan kolaboratif lintas sektor dan komunitas. Badan Penghubung bukan hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai agen diplomasi daerah, promotor budaya, serta penghubung sinergi pembangunan antara Bali dan tingkat nasional.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kekayaan Budaya dan Pariwisata Bali 2. Komunitas Diaspora Bali di Jakarta dan Sekitarnya 3. Aset Fisik Pemprov Bali di Luar Daerah 4. Jejaring Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Daerah 5. Kesiapan Masyarakat dalam Era Digital dan Media Sosial 6. Ketersediaan SDM Lokal dengan Kompetensi Budaya dan Layanan	1. Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal 2. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai 3. Promosi Budaya yang Belum Terstruktur 4. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal 5. Minimnya Pendataan dan Pembinaan Diaspora Bali 6. Keterbatasan Kapasitas SDM	1. Keberlanjutan Promosi Budaya Bali 2. Inklusivitas dan Keadilan Sosial bagi Diaspora Bali 3. Pemanfaatan Aset dan Infrastruktur Perwakilan yang Ramah Lingkungan 4. Transformasi Digital yang Aman dan Inklusif 5. Ketahanan Operasional terhadap Krisis dan Perubahan Iklim	1. Perubahan Iklim dan Urbanisasi 2. Globalisasi Budaya 3. Transformasi Digital Global 4. Mobilitas Global dan Diaspora	1. Reformasi Birokrasi dan SPBE 2. Penguatan Identitas Nasional dan Budaya Lokal 3. Pemerataan Pelayanan Publik 4. Perencanaan Kolaboratif dan Konektivitas Antardaerah	1. Kepadatan dan Mobilitas Tinggi 2. Diversitas Etnis dan Budaya 3. Persaingan Promosi Budaya Antar Daerah 4. Keterbatasan Lahan dan Tekanan Urban	1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi 2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya 3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta 4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Tujuan menggambarkan arah strategik dan merupakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi adalah

- 1. pelayanan hubungan antar lembaga,
- 2. pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
- 3. pelayanan promosi dan informasi seni budaya dan
- 4. pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	90	90

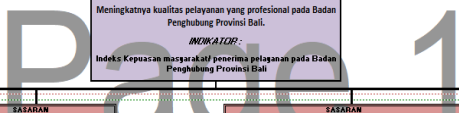
3.2. Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan tujuan Badan Penghubung diatas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah :

- 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- 2. Pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
- 3. Pelayanan Promosi dan Informasi

Tergambar pada pohon kinerja dan cascading Badan Penghubung
Pohon Kinerja

21

3.3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2025-2029 maka akan dilaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

3.4 Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Kebijakan yang dilaksanakan Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII
2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual
3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta
4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan wisma Badan Penghubung 3. Pelayanan Promosi dan Informasi 4. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi umum perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 2. Penyediaan bahan logistik kantor
 3. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Pelayanan Penghubung
- Kegiatan pelaksanaan pelayanan Penghubung
- Sub Kegiatan :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparaturnya dan masyarakat dengan output terlaksananya pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat Bali di Jakarta baik dalam bentuk seminar, semiloka, workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya
 2. Fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dengan output terlaksananya pagelaran rutin, pekan-pekan, paket khusus pesona budaya, dan pameran-pameran kuliner
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung dengan output lancarnya pelaksanaan/operasional tugas pimpinan/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang bertugas ke Jakarta

Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2024-2026		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT														
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi (Rutin)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	5.627.612.209	79	6.928.728.616	79,2	7.681.982.081	79,4	8.001.421.700	79,6	8.048.911.745	79,8	8.453.439.944
			Program Pelayanan Penghubung (Prioritas)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	88,86	90	3.071.865.180	85,60	2.960.474.467	85,65	2.924.797.764	85,70	3.398.589.505	85,75	3.458.321.907	85,8	3.525.868.643

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN			STRATEGI		KET
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	85,8	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII	Program Pelayanan Penghubung	

				2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memanfaatkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali

Tujuan			Sasaran Strategis		Strategi						
Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga 2. Indeks kepuasan pelanggan wisma 3. Indeks kepuasan pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung	90	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	90	90	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan	Program Pelayanan Penghubung

										surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel T-C.27 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 1 (2025)		Target Tahun 2 (2026)		Target Tahun 3 (2027)		Target Tahun 4 (2028)		Target Tahun 5 (2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lok
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,86	82	6.928.728.616	82,5	7.681.982.081	83	8.001.421.700	83,5	8.048.911.745	84	8.453.439.944	84	39.114.484.086	Banhub	JKT
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	4.999.300	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	54.999.300		
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	5 dok	5 dok	4.999.300	5 dok	10.000.000	5 dok	10.000.000	5 dok	15.000.000	5 dok	15.000.000	5 dok	54.999.300		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	3.119.038.696	100%	3.186.724.311	100%	3.364.421.700	100%	3.364.421.700	100%	3.397.989.944	100%	16.432.596.351		
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dok	12 dok	3.119.038.696	12 dok	3.138.724.311	12 dok	3.316.421.700	12 dok	3.316.421.700	12 dok	3.349.989.944	12 dok	16.240.596.351		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	0 dok	-	0	12 dok	48.000.000	12 dok	48.000.000	12 dok	48.000.000	12 dok	48.000.000	12 dok	192.000.000		

				asi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	230.640.900	100%	324.942.800	100%	367.000.000	100%	385.000.000	100%	470.000.000	100%	1.777.583.700		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	14.989.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	54.981.200	3 paket	59.995.200	3 paket	60.000.000	3 paket	60.000.000	3 paket	80.000.000	3 paket	314.976.400		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	90.000.000	4 paket	104.947.600	4 paket	105.000.000	4 paket	105.000.000	4 paket	120.000.000	4 paket	460.000.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	8.499.300	4 paket	10.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	78.499.300		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	62.171.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	182.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	844.171.000		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	229.503.420	100%	481.801.522	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.411.304.942		
				Pengadaan Sarana dan	Jumlah unit pengadaan	10 unit	15 unit	229.503.420	15 unit	481.801.522	15 unit	300.000.000	15 unit	200.000.000	15 unit	200.000.000	100%	1.411.304.942		

				Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan															
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.474.896.236	100%	1.729.753.848	100%	2.010.000.000	100%	2.084.490.045	100%	2.122.450.000	100%	9.421.590.129		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	12 lap	8.989.100	12 lap	10.000.000	12 lap	10.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap	58.989.100		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	306.800.000	12 lap	350.000.000	12 lap	400.000.000	12 lap	400.000.000	12 lap	400.000.000	12 lap	1.856.800.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	12 lap	1.159.107.136	12 lap	1.369.753.848	12 lap	1.600.000.000	12 lap	1.669.490.045	12 lap	1.707.450.000	12 lap	7.505.801.029		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	1.869.650.064	100%	1.948.759.600	100%	1.950.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.248.000.000	100%	10.016.409.664		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	14 unit	1.332.537.868	14 unit	1.349.759.600	14 unit	1.500.000.000	14 unit	1.550.000.000	14 unit	1.750.000.000	14 unit	7.482.297.468		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	3 unit	3 unit	395.343.000	3 unit	449.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	1.744.343.000		

					dipelihara/ direhabilitasi															
				Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnyayang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	4 unit	141.769.196	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	198.000.000	4 unit	789.769.196		
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	90	2.960.474.467	90	2.924.797.764	90	3.398.589.505	90	3.458.321.907	90	3.525.868.643	90	16.268.052.286		JKT
				Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	85,60	90	2.960.474.467	90	2.924.797.764	90	3.398.589.505	90	3.458.321.907	90	3.525.868.643	90	16.268.052.286		
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yangditingka tkan	12 lap	12 lap	159.928.487	12 lap	100.000.000	12 lap	150.000.000	12 lap	150.000.000	12 lap	150.000.000	12 lap	709.928.487		
				Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian senibudaya	12 lap	12 lap	314.769.196	12 lap	228.669.000	12 lap	348.589.505	12 lap	358.321.907	12 lap	375.868.643	12 lap	1.626.218.251		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisa si pelaksana an pelayanan penghubu ng	12 lap	12 lap	2.485.776.784	12 lap	2.596.128.764	12 lap	2.900.000.000	12 lap	2.950.000.000	12 lap	3.000.000.000	12 lap	13.931.905.548		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2025-2029 disusun berdasarkan atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 agar Renstra Badan Penghubung dapat terwujud.

Adapun Sasaran strategis dan IKU Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator kinerja :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pengukurannya dilaksanakan dengan pengisian kuesioner pada pelayanan hubungan antar lembaga, pelayanan promosi informasi di Anjungan Bali TMII, pelayanan terhadap tamu wisma dan pelayanan terhadap pembinaan umat.

Pada RPJMD Badan Penghubung Provinsi Bali mengampu urusan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali 4. Pelayanan promosi dan informasi melalui Anjungan Daerah Bali di Jakarta	Subbid Hubungan Antar Lembaga Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Subbid Promosi dan Informasi	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program Pelayanan Penghubung

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dalam tercapai secara optimal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah selesainya penyusunan Rancangan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmatnya kepada segenap karyawan Badan Penghubung Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung											
	Terwujudnya Pelayanan yang Profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	90	90	90	90	90	90	90	
		Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	90	90	90	90	90	90	90	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					10.606.779.845,00		11.400.011.205,00		11.507.233.652,00		11.979.308.587,00		12.265.360.349,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.681.982.081,00		8.001.421.700,00		8.048.911.745,00		8.453.439.944,00		8.761.781.822,00	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	82	82,5	7.681.982.081,00	83	8.001.421.700,00	83,5	8.048.911.745,00	84	8.453.439.944,00	84,5	8.761.781.822,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					2.924.797.764,00		3.398.589.505,00		3.458.321.907,00		3.525.868.643,00		3.503.578.527,00	
Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	90	90	90	2.924.797.764,00	90	3.398.589.505,00	90	3.458.321.907,00	90	3.525.868.643,00	90	3.503.578.527,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
TOTAL KESELURUHAN					10606779845.00		11400011205.00		11507233652.00		11979308587.00		12265360349.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung							
	Terwujudnya Pelayanan yang Profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82	82	82,5	83	83,5	84	84,5	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks	90	90	90	90	90	90	90	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				10.606.779.845,00		11.400.011.205,00		11.507.233.652,00		11.979.308.587,00		12.265.360.349,00		
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.681.982.081,00		8.001.421.700,00		8.048.911.745,00		8.453.439.944,00		8.761.781.822,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	82,5	7.681.982.081,00	83	8.001.421.700,00	83,5	8.048.911.745,00	84	8.453.439.944,00	84,5	8.761.781.822,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Penghubung	
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.186.724.311,00		3.364.421.700,00		3.364.421.700,00		3.397.989.944,00		3.404.331.822,00		
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	16	20	3.186.724.311,00	20	3.364.421.700,00	20	3.364.421.700,00	20	3.397.989.944,00	20	3.404.331.822,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.138.724.311,00		3.316.421.700,00		3.316.421.700,00		3.349.989.944,00		3.356.331.822,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	16	20	3.138.724.311,00	20	3.316.421.700,00	20	3.316.421.700,00	20	3.349.989.944,00	20	3.356.331.822,00		
5.07.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00		
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				324.942.800,00		367.000.000,00		385.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	324.942.800,00	3	367.000.000,00	3	385.000.000,00	3	470.000.000,00	3	470.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.995.200,00		60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	59.995.200,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00		
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				104.947.600,00		105.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	104.947.600,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00		
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		182.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	182.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				481.801.522,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	481.801.522,00	15	300.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00		
5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				481.801.522,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	481.801.522,00	15	300.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00		
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.729.753.848,00		2.010.000.000,00		2.084.490.045,00		2.122.450.000,00		2.272.450.000,00		
Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.729.753.848,00	12	2.010.000.000,00	12	2.084.490.045,00	12	2.122.450.000,00	12	2.272.450.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.369.753.848,00		1.600.000.000,00		1.669.490.045,00		1.707.450.000,00		1.807.450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.369.753.848,00	12	1.600.000.000,00	12	1.669.490.045,00	12	1.707.450.000,00	12	1.807.450.000,00		
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.948.759.600,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		2.248.000.000,00		2.400.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	1.948.759.600,00	4	1.950.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.248.000.000,00	4	2.400.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	14		14		14		14					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3					
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.349.759.600,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.750.000.000,00		1.850.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	14	1.349.759.600,00	14	1.500.000.000,00	14	1.550.000.000,00	14	1.750.000.000,00	14	1.850.000.000,00		
5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				449.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	449.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		198.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	198.000.000,00	4	250.000.000,00		
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				2.924.797.764,00		3.398.589.505,00		3.458.321.907,00		3.525.868.643,00		3.503.578.527,00		
Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	90	90	2.924.797.764,00	90	3.398.589.505,00	90	3.458.321.907,00	90	3.525.868.643,00	90	3.503.578.527,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Penghubung	
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				2.924.797.764,00		3.398.589.505,00		3.458.321.907,00		3.525.868.643,00		3.503.578.527,00		
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	12	12	2.924.797.764,00	12	3.398.589.505,00	12	3.458.321.907,00	12	3.525.868.643,00	12	3.503.578.527,00		
	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				228.669.000,00		348.589.505,00		358.321.907,00		375.868.643,00		353.578.527,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	12	12	228.669.000,00	12	348.589.505,00	12	358.321.907,00	12	375.868.643,00	12	353.578.527,00		
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				2.596.128.764,00		2.900.000.000,00		2.950.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12	12	2.596.128.764,00	12	2.900.000.000,00	12	2.950.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					324.942.800,00		367.000.000,00		385.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	324.942.800,00	4	367.000.000,00	4	385.000.000,00	4	470.000.000,00	4	470.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3		3		3		3						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	4		4		4		4						
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					59.995.200,00		60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3	59.995.200,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00			
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					104.947.600,00		105.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	4	104.947.600,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00			
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		182.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	150.000.000,00	12	182.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00			
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					481.801.522,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	15	481.801.522,00	15	300.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00			
5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					481.801.522,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	15	481.801.522,00	15	300.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00				
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					1.729.753.848,00		2.010.000.000,00		2.084.490.045,00		2.122.450.000,00		2.272.450.000,00				
Pemerintahan Daerah																	
	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	1.729.753.848,00	12	2.010.000.000,00	12	2.084.490.045,00	12	2.122.450.000,00	12	2.272.450.000,00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12				12				12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12			12				12					12	
5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00				
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00				
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.369.753.848,00		1.600.000.000,00		1.669.490.045,00		1.707.450.000,00		1.807.450.000,00				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12	1.369.753.848,00	12	1.600.000.000,00	12	1.669.490.045,00	12	1.707.450.000,00	12	1.807.450.000,00				
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.948.759.600,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		2.248.000.000,00		2.400.000.000,00				
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	4	1.948.759.600,00	4	1.950.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.248.000.000,00	4	2.400.000.000,00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3				3				3				3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		14		14		14		14		14				
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.349.759.600,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.750.000.000,00		1.850.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		14	1.349.759.600,00	14	1.500.000.000,00	14	1.550.000.000,00	14	1.750.000.000,00	14	1.850.000.000,00			
5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					449.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3	449.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00			
5.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		198.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	198.000.000,00	4	250.000.000,00			
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					2.924.797.764,00		3.398.589.505,00		3.458.321.907,00		3.525.868.643,00		3.503.578.527,00			
Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali (Indeks)	90	90	90	2.924.797.764,00	90	3.398.589.505,00	90	3.458.321.907,00	90	3.525.868.643,00	90	3.503.578.527,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Penghubung		
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					2.924.797.764,00		3.398.589.505,00		3.458.321.907,00		3.525.868.643,00		3.503.578.527,00			
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	12	12	12	2.924.797.764,00	12	3.398.589.505,00	12	3.458.321.907,00	12	3.525.868.643,00	12	3.503.578.527,00			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12		12		12		12		12						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	12	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00			
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya					228.669.000,00		348.589.505,00		358.321.907,00		375.868.643,00		353.578.527,00			
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	12	12	12	228.669.000,00	12	348.589.505,00	12	358.321.907,00	12	375.868.643,00	12	353.578.527,00			
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					2.596.128.764,00		2.900.000.000,00		2.950.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12		12	2.596.128.764,00	12	2.900.000.000,00	12	2.950.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00			

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI BALI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks	90	90	90	90	90	90	90	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks	90	90	90	90	90	90	90	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	komulatif	Indeks	90	90	90	90	90	90	90	